

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

I. Perkembangan Inflasi Daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya jasa dan resiko kedepan pada Triwulan IV Tahun 2022.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Inflasi Provinsi Jambi Periode Bulan Desember 2022 tercatat mengalami Inflasi 0,77 % (mtm), tahunan Inflasi 6,35 % (yoy) dan Tahun berjalan Inflasi 6,35 % (ytd) dan Inflasi Nasional sebesar 0,66 % (mtm), secara bulanan realisasi tersebut lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya yang mengalami inflasi sebesar 1,17 % (mtm) atau inflasi sebesar 5,51 % (yoy). Terdapat beberapa kelompok bahan pangan yang sempat mengalami kenaikan dan penurunan pada bulan September 2022.

Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Kabupaten yang bukan termasuk dalam IHK tetapi termasuk dalam salah satu Kabupaten Non IHK sehingga perhitungan inflasi Kabupaten Sarolangun mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo yang merupakan salah satu TPID sampel Provinsi Jambi, alasan Kabupaten Sarolangun mengacu kepada Kabupaten Muara Bungo karena merupakan Kabupaten terdekat yang diambil sampel IHK.

Pada Bulan Desember 2022 Kabupaten Muara Bungo tercatat mengalami inflasi 0,68 % (mtm) tahunan Inflasi 6,04 % (yoy) dan tahun berjalan Inflasi 6,04 % (ytd), Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah : Daging ayam ras, cabai merah, rokok kretek filter, telur ayam ras dan cabe rawit Sedangkan Komoditi penyumbang adalah : bawang merah, beras kangkung, televisive berwarna dan besi beton.

Berdasarkan evaluasi dan pemantauan perkembangan harga rata-rata kebutuhan pokok dan bahan penting lainnya di Kabupaten Sarolangun untuk Triwulan IV pada Bulan Oktober s/d Desember 2022 rata-rata harga Kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya rata-rata stabil dan ada mengalami kenaikan dan penurunan harga, serta tidak ditemukan fluktuasi harga yang dapat membahayakan inflasi seputaran komoditi di Kabupaten Sarolangun. Kebutuhan bahan pokok yang mengalami perubahan harga di Pasar Atas di Kabupaten Sarolangun seperti : cabe merah, cabe rawit, bawang merah, daging ayam potong, telur ayam ras dan beras. Berikut adalah data harga rata-rata bulanan komoditas di Pasar Atas Kabupaten Sarolangu :

1. Harga bawang Putih Bulan Oktober sebesar Rp. 22.000,-/Kg pada Bulan November stabil sebesar Rp. 22.000,-/Kg pada Bulan Desember mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 24.000,-/Kg.
2. Harga bawang Merah Bulan Oktober sebesar Rp. 34.000,-/Kg, pada Bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 32.000,- pada Bulan Desember stabil sebesar Rp. 32.000,- /Kg.
3. Harga cabe merah keriting dan besar Bulan Oktober sebesar 36.000,-/Kg, pada Bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 25.000,- pada Bulan Desember mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 28.000,- /Kg.
4. Harga cabe rawit hijau Bulan Oktober Rp. 30.000,-/Kg pada Bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 20.000,-/Kg, pada Bulan Desember mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 30.000,-/Kg.
5. Harga Gula Pasir Bulan Oktober sebesar Rp. 14.000,-/Kg, pada Bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 13.500,- pada Bulan Desember mengalami kenaikan

menjadi sebesar Rp. 14.000,-/Kg.

6. Harga Minyak sayur kemasan Bulan Oktober sebesar Rp. 20.000,-/Kg, stabil pada Bulan November sebesar Rp. 20.000,- pada Bulan Desember stabil sebesar Rp. 20.000,- /Kg.
7. Harga Daging Ayam Kampung Bulan Oktober Rp. 60.000,-/Kg pada Bulan November penurunan sebesar Rp. 58.000,- pada Bulan Desember penurunan menjadi sebesar Rp. 55.000,-/Kg.
8. Harga Daging Ayam Broiler Bulan Oktober Rp. 34.000,-/Kg pada Bulan November mengalami penurunan sebesar Rp. 33.000,-/Kg, pada Bulan Desember mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp. 38.000,-/Kg.
9. Harga Daging Sapi/Kerbau Bulan Oktober Rp. 130.000,-/Kg pada Bulan November stabil sebesar Rp. 130.000,-/Kg, pada Bulan Desember stabil sebesar Rp. 130.000,-/Kg.
10. Harga Telur Ayam Ras Bulan Oktober Rp. 48.000,-/Karpas pada Bulan November mengalami kenaikan sebesar Rp. 50.000,-/Karpas, pada Bulan Desember mengalami kenaikan sebesar Rp. 54.000,-/Karpas.
11. Harga gas LPG 3 kg di pangkalan 18.000,-/Tabung (HET) dan di pengecer/toko mengalami kenaikan menjadi Rp. 20.000,- s/d Rp. 25.000.

Perkembangan Indeks Harga Konsumen Inflasi Provinsi Jambi Periode Bulan Desember 2022 tercatat mengalami Inflasi 0,77 % (mtm), tahunan Inflasi 6,35 % (yoy) dan Tahun berjalan Inflasi 6,35 % (ytd) dan Pada Bulan Desember 2022 Kabupaten Muara Bungo tercatat mengalami inflasi 0,68 % (mtm) tahunan Inflasi 6,04 % (yoy) dan tahun berjalan Inflasi 6,04 % (ytd), Komoditas penyumbang inflasi terbesar adalah : Daging ayam ras, cabai merah, rokok kretek filter, telur ayam ras dan cabe rawit Sedangkan Komoditi penyumbang adalah : bawang merah, beras kangkung, televisi berwarna dan besi beton.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

II. Identifikasi Permasalahan Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun Triwulan IV Tahun 2022.

Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tekanan terhadap Deflasi dan Inflasi lebih tinggi dari perkiraan antara lain :

- Dengan Kondisi perubahan iklim, tingginya curah hujan di kawasan sentra tetap berisiko menghambat proses produksi dan paska produksi. mundurnya awal musim hujan yang sulit diantisipasi pada Triwulan IV Tahun 2022 Produktivitas tanaman selama musim hujan akan lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau, pasokan yang dapat mengganggu produksi dan kelancaran distribusi bahan pangan, dikuatirkan jumlah pasokan tidak sesuai, sehingga harga komoditas pertanian saat ini akan mengalami penurunan yang begitu dratis.
- Dampak penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan kenaikan harga pada kelompok beberapa bahan pangan pokok bergejolak terlalu tinggi.
- Permasalahan di daerah dengan karakteristik wilayah yang berbeda sehingga membutuhkan penanganan, sehingga penanganannya perlu sinergi dan terbatasnya kapasitas produksi dalam daerah terutama produktivitas yang rendah dan luas lahan semakin menyusut.
- Melaksanakan sidak, pemantauan dan pengawasan terhadap ketersediaan bahan pangan pokok, penerapan Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan jalur Distribusi tidak terganggu dan menjaga distribusi pasokan bahan

pangan dari sentra produksi ke pusat perdagangan berjalan dengan lancar, serta Operasi Pasar guna menstabilisasi harga bahan pokok.

- Kabupaten Sarolangun masih terdapat beberapa kebutuhan bahan pokok yang didatangkan dari luar daerah Kabupaten Sarolangun seperti beras, bawang merah, bawang putih, kentang, kol/kubis, cabe, dan ikan (dari daerah Kabupaten Kerinci, Kab. Merangin, Kota Linggau, Kabupaten Rejang Lebong).
- Mendorong kerja sama antar daerah dalam mengendalikan inflasi, perluasan akses pasar dengan memperkuat Kerjasama Antar Daerah dan diperluas ke seluruh daerah.
- Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan Pada tanggal 4 November 2022 Penandatanganan Naskah Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.
- Kenaikan inflasi di penghujung tahun disebabkan oleh meningkatnya permintaan dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) dan Perayaan Tahun Baru, di tengah terbatasnya pasokan pangan yang didorong oleh tidak optimalnya produksi selama masa pandemi dan meningkatnya curah hujan sehingga memengaruhi produksi dan distribusi bahan pangan.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

III. PELAKSANAAN PROGRAM KERJA TRIWULAN IV TAHUN 2022

Kegiatan TPID Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan pada Triwulan IV Bulan Oktober 2022 s/d Desember 2022 antara lain :

A. Pemantauan harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya Dinas Perindagkop.

1. Pemantauan harga-harga komoditas bahan pokok dan bahan penting lainnya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sarolangun dan Dinas Ketahanan Pangan setiap hari dan Laporan Bulanan disampaikan ke pada Bapak Bupati Sarolangun Cq. Bagian Bina Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Sarolangun. Pemantauan dilakukan di pasar atas Sarolangun dan Pasar Sungai Benteng Kecamatan Singkut. Pemantauan pergerakan harga bahan kebutuhan pokok yang meliputi antara lain : beras, cabai merah, cabe rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam boiler, telur ayam, minyak gorin kemasan/Curah, gula, susu, jagung, tepung terigu, mie instan, kedelai, tahu, tempe, gas Lpg 3 Kg, pisang, semen dan jeruk
2. OPERASI PASAR sebesar Rp. 107.300.000,- antara lain beras, gula, minyak sayur dan mie instan oleh Dinas KOPERINDAG di beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.
 - Rabu, 14 Desember 2022 dilaksanakan di Kecamatan Sarolangun dan Kecamatan Bathin VIII.
 - Kamis, 15 Desember 2022 dilaksanakan di Kecamatan Pelawan dan Kecamatan Singkut.
 - Senin, 19 Desember 2022 dilaksanakan di Kecamatan Limun.
 - Selasa 20 Desember 2022 dilaksanakan di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Air Hitam.
 - Rabu, 21 Desember 2022 dilaksanakan di Kecamatan Mandiangin.
3. Kegiatan Pemberian Dana BTT untuk Kegiatan Subsidi UMKM dalam Kabupaten

Sarolangun total dana BTT sebesar Rp. 468.000.000,-.

4. Pada Triwulan IV harga rata-rata beberapa bahan pangan pokok dan bahan penting lainnya antara lain ada yang setabil, ada yang mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan dan ada beberapa Kebutuhan Pangan yang naik seperti harga ayam potong dari harga 35 ke 37 hingga 38 ribu per kilo gram, harga cabai Merah 30 ke 33, 34 ribu rupiah, telur ayam ras 54 menjadi 56/karpet, beras 117 ribu naik ke 137 ribu, ada juga yang naik, tapi naiknya tidak signifikan dan masih dalam kategori stabil.

B. Perkembangan Kegiatan di Sektor Peternakan dan Perikanan.

1. Pada Tanggal 29 September 2022 dilaksanakan pelaksanaan Kegiatan Penebaran Benih Ikan (Restocking) di Desa Muara Cuban Kecamatan Batang Asai ikan semah sebanyak 2.250 ekor dan Desa Muara Air Dua Kecamatan Batang Asai ikan semah 2.250 ekor .
2. Pada tanggal 19 November 2022 dilaksanakan kegiatan pemantauan, peninjauan ternak sapi, Kerbau dan penyuntikan kerbau Desa Pelawan Jaya Kecamatan Pelawan.
3. Pada tanggal 8 Desember 2022 dilaksanakan kegiatan pemantauan, peninjauan ternak sapi, Kerbau dan penyuntikan kerbau Desa Mekarsari Kecamatan Pelawan.
4. Pada tanggal 15 Desember 2022 dilaksanakan kegiatan pemantauan, peninjauan ternak sapi, kerbau dan penyuntikan kerbau Desa Lubuk Sepuh Kecamatan Pelawan.

C. Pengembangan Kegiatan di Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.

1. Pada tanggal 1 Oktober 2022 Kunjungan dan panen di kebun Melon Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Bapak PJ. Bupati Sarolangun bersama Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Forkopinda & OPD terkait.
2. Pada tanggal 1 Oktober 2022 Kunjungan dan panen cabe merah di kebun cabe Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan Bapak PJ. Bupati Sarolangun bersama Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun, Forkopinda dan OPD terkait.
3. Pada tanggal 11 Oktober 2022 Pemantauan dan pengawasan kebun Cabe di Desa Lubuk Sayak Kecamatan Pelawan.
4. Pada tanggal 11 Oktober 2022 dilaksanakan panen bawang merah di Kelompok Tani Muda Karya Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut.
5. Pada tanggal 2 November 2022 dilaksanakan Panen Padi sawah di kelompok Tani Selang Rengas Kel. Sarolangun Kembang Kecamatan Sarolangun yang dipimpin langsung Bapak PJ. Bupati sarolangun dan dihadiri oleh Forkopinda dan OPD terkait.
6. Tanggal 7 Desember 2022 dilaksanakan pertemuan lapangan pengawalan, pemantauan lokasi cabe dan panen cabe merah di Kelompok Tani Rantau Jaya Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan dengan luas lahan tanaman cabe 0.5 Ha dengan hasil produksi pada tanggal 7 Desember 2022 sebanyak 300 Kg.
7. Pada tanggal 14 Desember 2022 dilaksanakan penyerahan Mulsa Plastik dari Dana BTT kepada Kelompok Tani. Antara lain :
 - o Kelompok Tani Karya Usaha Tani Desa Mekar Sari Kecamatan Singkut.
 - o Kelompok Tani Konco Tani Desa Pematang Kolim Kecamatan Pelawan.
 - o Kelompok Tani Maju Bersama Desa Pelawan Kecamatan Pelawan.
 - o Kelompok Tani Rantau Jaya Desa Rantau Tenang Kecamatan Pelawan.
 - o Kelompok Tani Talang Maju Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun.
 - o Kelompok Tani Gading makmur Kelurahan Aur Gading Kecamatan Sarolangun.

D. Pengembangan Kegiatan di Sektor Ketahanan Pangan.

1. Pada tanggal 26 September s/d 01 Oktober 2022 dilaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pengembangan Pangan Lokal beragam bergizi seimbang dan aman di KWT Gading Lestari Kelurahan Aur Gading dan KWT Asika Desa Sungai Merah Kecamatan Pelawan.
2. Pada tanggal 3 November 2022 ,dilaksanakan Gerakan Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN/Honorer Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan di Pelataran Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, "Gerakan Serentak Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN Kabupaten Sarolangun".
3. Pada tanggal 29 November s/d 08 Desember 2022 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Tematik Kegiatan P2L Desa Sungai Benteng Kecamatan Singkut.
4. Pada tanggal 01 Desember 2022 , Hari Pertama dilaksanakan Gerakan Pembelian Beras Lokal /Bulog bagi ASN/Honorer Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan di Pelataran Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, "Gerakan Serentak Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN Kabupaten Sarolangun"
5. Pada tanggal 02 Desember 2022, Hari Kedua dilaksanakan Gerakan Pembelian Beras Lokal /Bulog bagi ASN/Honorer Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan di Pelataran Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sarolangun, "Gerakan Serentak Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN Kabupaten Sarolangun"
6. Pada tanggal 13 Desember 2022 dilaksanakan Kegiatan Pemberian Dana BTT untuk Kegiatan Pekarangan Pangan Lestari kepada 5 (lima) Kelompok Wanita Tani sebanyak Rp. 75.000.000. masing-masing KWT sebesar 15.000.000,- dan Dana BTT untuk Kegiatan Subsidi Harga Pangan Pemberian Subsidi harga kedelai kepada 23 Pengrajin Tahu Tempe sebesar Rp. 96.000.000,- masing-masing Pengrajin Tahu Tempe Rp. 4.200.000,-

E. Dinas Perhubungan

1. Pada tanggal 7 Desember 2022 dilaksanakan penyerahan bantuan subsidi Dana BTT untuk transportasi Angkutan Desa sebesar Rp. 200.000 kepada sopir Andes yang di salurkan secara non tunai yang diserahkan ssecara simbolik oleh Kabid Perhubungan Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Sarolangun.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

IV. EVALUASI DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN

EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

Pada umumnya untuk menciptakan pengendalian inflasi Daerah yang efektif dan terarah memperkuat peran dan fungsi TPID Kabupaten Sarolangun dengan melakukan penguatan kelembagaan TPID, peningkatan sektor produksi, efisensi tata niaga, stabilitasi harga dan penyediaan sarana dan prasarana penunjang.

Langkah-langkah yang diambil Kabupaten Sarolangun untuk memperkuat peran dan fungsi

TPID diantaranya sebagai berikut :

1. Pada tanggal 2 Oktober 2022 mengikuti Rapat Zoom Meeting dengan Bapak Gubernur Jambi dalam rangka Gerakan Seentak Pembelian Produk Lokal bagi ASN Se-Provinsi Jambi di Rumah Dinas Bupati Sarolangun dihadiri oleh OPD terkait.
2. Pada tanggal 5 Oktober 2022 dilaksanakan Launching Gerakan Serentak Beli Beras Lokal /Bulog bagi ASN Kabupaten Sarolangun yang dilaksanakan di Pelataran Kantor Bupati Sarolangun, “ Apel Gabungan Pencanangan Gerakan Serentak Pembelian Beras Lokal/Bulog bagi ASN Kabupaten Sarolangun”
3. Tanggal 19 Oktober 2022, Mengikuti Rapat Evaluasi Pengendalian Inflasi di Provinsi Jambi, untuk Kabupaten/Kota Rapat Evaluasi melalui Aplikasi Zoom Meeting, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh OPD terkait Kabupaten Sarolangun.
4. Pada tanggal 24 Oktober 2022 Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri Jakarta Pusat, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :
 1. Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 24 Oktober 2022, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
 2. Kunci penanganan inflasi Indonesia mesti rentak seperti bagaimana kita penanganan Covid-19, jadi Penanganan inflasi harus kerjasama antara pusat dan daerah.
 3. Rapat Koordinasi TPID bertujuan untuk membahas sejauh mana daerah menyikapi serta melakukan pengendalian inflasi di daerah guna mengetahui inflasi dan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemulihan ekonomi di daerah.
 4. Tingkat inflasi Indonesia pada September 2022 sebesar 5,95%. Indonesia saat ini masih bisa mempertahankan tingkat inflasi dibawah 6%. Kelompok makanan, minuman, memberikan andil Deflasi 0,08%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi adalah Bawang Merah (-0,06%), Cabai Merah (-0,05%), Minyak Goreng (-0,03%), Tomat (-0,02%); dan Cabai Rawit (-0,02%).
 5. Secara Nasional Ketersediaan Pangan Strategis Selama Januari - Desember 2022 dari produksi dalam negeri cukup aman, namun untuk komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau, dan gula konsumsi masih harus dipenuhi dari impor.
 6. Strategi Baru Kementerian Pertanian menghadapi krisis pangan dunia antara lain :
 - Peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah; serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, & daging sapi.
 - Pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum; domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi.
 - Peningkatan ekspor seperti sarang burung walet, porang, ayam, telur.
 7. Dampak Program Pengalihan Subsidi BBM sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp. 24,17 Triliun untuk 3 Program Kegiatan yaitu :
 - Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp. 12,4 Triliun

Subsidi Bantuan Upah (SBU) Rp. 9,6 Triliun

- Subsidi Transportasi Umum Melalui Anggaran Daerah Rp. 2,17 Triliun

8. Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau pada September 2022 memberikan andil Deflasi 0,08%, Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi Bawang Merah -0,06%, Cabai Merah -0,05%, Minyak Goreng -0,03%, Tomat -0,02% dan Cabai Rawit -0,02%.

9. Kebijakan mitigasi dampak kenaikan terhadap BBM, Dukungan yang diharapkan dari Pemerintah Daerah adalah :

- Daerah tidak perlu membuat sistem pemantauan, cukup integrasi dengan SP2KP Kemendag.
- Agar daerah mengalokasikan dana APBD untuk kegiatan pengambilan data harga Bapokting sebagai bagian dari

10. Diseminasi indikator kinerja pengendalian inflasi perlu dilakukan secara berkala dalam rangka merancang program kerja yang lebih tepat dan terarah oleh TPIP dan TPID

11. Sejalan dengan Inflasi Bahan Pangan yang cenderung terus memberikan andil inflasi/deflasi, serta sesuai dengan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, maka ditetapkan 20 komoditas bahan pangan terpilih yang akan dijadikan patokan kinerja pengendalian inflasi TPIP dan TPID.

12. Dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan, akan dirilis 3 buah indikator kinerja pengendalian inflasi dengan menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur yaitu:

- Indeks Perkembangan Harga
- Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah, dan
- Koefisien Variasi Harga Mingguan

13. Pada penyediaan data untuk 3 indikator kinerja diatas, dilakukan sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, seluruh K/L/I/D mensinergikan kepemilikan data (*data ownership*) yang terkait dengan data harga, stok atau produksi sebagai indikator kinerja pengendalian inflasi.

14. Dalam rangka mendiseminasikan indikator kinerja pengendalian inflasi daerah yang lebih terukur dan berkesinambungan maka Pemerintah Daerah harus dapat melakukan tiga indikator kinerja pengendalian inflasi yaitu Indeks perkembangan harga, indeks disparitas harga antar wilayah dan koefisien harga mingguan.

15. Pemerintah akan mampu mengendalikan inflasi di bawah angka 3 %, jika seluruh Kepala Daerah Gubernur/Bupati/Walikota dapat bekerja sama dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) maupun Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP).

16. Pemerintah daerah juga harus melakukan usaha yang lebih dalam rangka penanganan inflasi di daerah seperti monitoring ketersediaan pasokan dan harga pangan, memobilisasi dari daerah surplus ke daerah deficit, melaksanakan operasi pasar yang melibatkan stakeholders, penguatan infrastruktur untuk stabilisasi pasokan dan harga, koordinasi dan fasilitasi untuk pengendalian inflasi daerah.

▪

5. Pada tanggal 29 Oktober 2022, dalam rangka Memeriahkan Hari Ulang Tahun Kabupaten Sarolangun ke-23, Kabupaten Sarolangun melaksanakan acara Jalan santai, sepeda Santai dan acara Sosialisasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) (Sosialisasi Aplikasi Ciptani, gerakan Konsumsi Cabai Olah, Sosialisasi Qris, Sosialisasi Cinta Bangsa dan Pahami Rupiah, Akuisisi Qris 1000 ASN dan Masyarakat umum, yang dilaksanakan di Laman Basomo Kabupaten Sarolangun.

6. Pada tanggal 31 Oktober 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah minggu ke dua, membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung sasana Bhakti Praja lantai 3 Kemendagri Jakarta Pusat dan di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun dan di hadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dilaksanakan secara Zoom Meeting pada tanggal 31 Oktober 2022, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
2. Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan Kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah Daerah Secara mingguan yang bertujuan untuk memantau perkembangan, langkah dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi dan mengidentifikasi penyebab permasalahan serta mencari solusi peningkatan Penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Tingkat inflasi Indonesia pada September 2022 sebesar 5,95%. Indonesia saat ini masih bisa mempertahankan tingkat inflasi dibawah 6%.Kelompok makanan, minuman, memberikan andil Deflasi 0,08%. Komoditas yang dominan memberikan andil deflasi Bawang Merah (-0,06%), Cabai Merah (-0,05%), Minyak Goreng (-0,03%), Tomat (-0,02%); dan Cabai Rawit(-0,02%).
4. Periode September 2022 terjadi Inflasi 1,17% sehingga secara year on year angka Inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,95%, terdapat 88 Pemda mengalami Inflasi dan 2 Pemda mengalami Deflasi (Kab. Manokwari dan Kab. Mimika).
5. Sebagai tindak lanjut arahan Presiden, Menteri Dalam Negeri menyebut kunci penanganan inflasi Indonesia mesti serempak seperti penanganan Covid-19. Penanganan inflasi adalah agregat kerja sama pusat dan daerah seperti contoh kita menangani pandemi Covid-19.
6. Kemendagri, BPS dan Kemendag menetapkan 20 komoditas bahan pangan sebagai proxy inflasi daerah untuk dilakukan pemantauan harga pangan antara lain beras, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabe merah, cabe rawit, minyak goreng, gula pasir, bawang putih, gading sapi, tepung terigu, udang, ikan kembung, mie instan, Tahu mentah, pisang, susu bubuk.
7. Indeks perkembangan harga Kabupaten/Kota, sampai dengan minggu ke-4 Oktober minyak goreng menjadi komoditas yg menyumbang kenaikan harga di 318 Kabupaten/Kota, beras di 281 Kabupaten/Kota dan gula pasir di 267 Kabupaten/Kota dan telur ayam ras di 150 Kabupaten/Kota yang selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti : bawang merah di 120 Kabupaten/Kota, daging ayam ras di 108 Kabupaten/Kota, bawang putih di 37 Kabupaten/Kota, cabai rawit di 31 Kabupaten/Kota.
8. Sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 28 Oktober 2022 berada dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu, namun perlu diwaspadai kenaikan harga beras dan kedelai.

Terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan Indeks disparitas harga antara wilayah di Bulan Oktober paling rendah, moderat dan paling tinggi dibanding rata-rata Nasional untuk 20 Komoditas Bahan Pangan Terpilih dengan penimbang nilai konsumsi dan terdapat 51 Kabupate/Kota yang tidak mengalami fluktuasi harga stabil.

10. Untuk Rakor Senin depan diminta kepada Daerah dengan inflasi bulan Oktober 2022 yang terendah, terbaik, diminta kepada Gubernur/Walikota/Bupati untuk dapat menyampaikan Best Practice pengendalian inflasi di daerah dan Khusus Gubernur/Walikota/Bupati sebagai Daerah dengan inflasi bulan Oktober 2022 yang Tertinggi, terbaik, diminta untuk dapat menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan.
11. Terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Pelaporan dari 514 Pemda terdapat 27 Pemda tidak menyampaikan laporan perkembangan harga harian dan 36 Pemda belum melakukan/pelaporan upaya dalam penanganan inflasi di daerah.
12. Diminta kepada Dinas Perindagkop dan Dinas Ketahanan Pangan daerah untuk dapat memantau perkembangan harga bahan pangan pokok setiap hari dan melaporkan kepada Kepala Daerah dan Kementrian.
13. Langkah-Langkah Extra Effort Menjaga Stabilitas Harga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan setiap Daerah antara lain :
 - Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
 - Melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
 - Pemanfaatan Platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
 - Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian Inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan social.
 - Mempercepat implementasi program tanam pangan pekarangan (misalnya cabai), untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
 - Menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh Pemerintah Daerah.
 - Memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya Cold Storage) terutama di daerah sentra produksi.
 - Memperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian inflasi pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilitas harga.

14. Pemerintah Daerah diharapkan dapat bekerjasama dengan Forkopindan dan Tum TPID Provinsi/Kabupaten/Kota agar dapat melaksanakan dan mengikuti Rapat Koordinasi TPID setiap minggu atau bulan.

7. Pada tanggal 4 November 2022 dilaksanakan Penandatanganan Naskah Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang dihadiri langsung oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE, MM, Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt.MM dan Bupati Bungo H. Mashuri, SP.ME serta dihadiri oleh OPD terkait, Kabag dari tiga Kabupaten yang mana kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Acara Penandatanganan Naskah Kerjasama Antar Daerah (KAD) Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangundi Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2022, Penandatanganan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dihadiri langsung oleh Bupati Tanah

Datar Eka Putra, SE, MM, Bupati Sarolangun Henrizal, S.Pt.MM dan Bupati Bungo H. Mashuri, SP.ME serta dihadiri oleh OPD terkait, Kabag dari tiga Kabupaten yang mana kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Bupati Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

2. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.
3. Kerjasama Antar Daerah (KAD) diharapkan dapat meningkatkan semua sektor seperti Katahanan Pangan, Pertanian, Peternakan dan lainnya, dan diharapkan dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan dari kedua Kabupaten.
4. Adapun kerjasama yang ditandatangani adalah antara Dinas Pertanian Tanah Datar dengan Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Sarolangun tentang fasilitasi, pendampingan, budidaya dan pemasaran komoditi pertanian.
5. Kabupaten Sarolangun merupakan daerah perkebunan dan pertambangan, sehingga kebutuhan masyarakat untuk cabai, tomat, bawang merah dan sayuran lainnya didatangkan dari luar daerah, dengan kerjasama ini ke depan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sarolangun juga bisa dipasok atau didatangkan dari Kabupaten Tanah Datar.
6. Kabupaten Tanah Datar mengandalkan sektor pertanian di samping sektor pariwisata sebagai sektor utama dalam pembangunan daerah.
7. Di sektor pertanian, Tanah Datar menjadi produsen cabai, tomat, bawang merah dan beberapa hasil sayuran lainnya yang mampu mengendalikan inflasi daerah, sehingga memperoleh penghargaan Terbaik I di Wilayah Sumatra pada TPID Award tahun 2021.
8. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar sangat serius dalam memajukan sektor pertanian, dengan ditandai dari 10 Program Unggulan (Progul) Tanah Datar, 3 Progul diantara di sektor pertanian.
9. Program Pembajakan Sawah gratis, dimana Pemerintah Daerah menggratiskan masyarakat untuk biaya BBM, biaya operator, biaya sewa mesin, sehingga biaya produksi petani lebih efisien. Kemudian kuota asuransi tani, asuransi ternak dan pupuk bersubsidi, sedangkan di sektor Pariwisata Kabupaten Tanah Datar memiliki 152 potensi destinasi wisata untuk dikunjungi.
10. Kabupaten Tanah Datar juga memiliki Istano Basa Pagaruyung, Puncak Aua Sarumpun yang memiliki pemandangan indah, Nagari Terindah Pariangan yang menorehkan prestasi Nasional sebagai desa Wisata Terbaik I Kategori Desa Berkembang dari Kemenparekraf dan meraih 2 rekor MURI atas batik beraroma kopi, Program Satu Nagari Satu Event yang dilaksanakan oleh 14 Nagari Se-Kabupaten Tanah Datar.
11. Semoga jalinan silaturahmi dan kerjasama bisa berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi kedua daerah dan juga masyarakat di daerah, tentunya butuh penanganan dan tindak lanjut serius dari OPD terkait antara kedua daerah.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berharap, untuk kedepannya tidak hanya sektor pertanian, namun sektor pariwisata ataupun sektor lainnya bisa dilaksanakan kerjasama antara Tanah Datar dengan Kabupaten Sarolangun ataupun dengan Kabupaten Bungo.

8. Pada tanggal 07 November 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah minggu ke tiga membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang diselenggarakan secara hybrid dari Gedung sasana Bhakti Praja Kemendagri Jakarta Pusat, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Kementerian Dalam Negeri Melaksanakan Kegiatan Rakor Pengendalian Inflasi dengan Pemerintah Daerah Secara mingguan yang bertujuan untuk memantau perkembangan,

langkah dan kegiatan yang telah dilakukan Pemerintah Daerah untuk pengendalian inflasi dan mengidentifikasi penyebab permasalahan serta mencari solusi peningkatan Penyerapan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Terdapat 10 Negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia termasuk dalam urutan ke-7 ekonomi terbesar di dunia, Tingkat inflasi di dunia akibat perang Rusia dan ukraina Indonesia termasuk dalam peringkat 139 dari 186 Negara di Dunia.
3. Inflasi Bulan Oktober 2022 antar wilayah 61 dari 90 IHK mengalami deflasi pada Bulan Oktober, inflasi yang paling dalam adalah Kota Gorontalo (-1,48 %) dan inflasi tertinggi manokware (0,76 %).
4. Penyumbang Kenaikan Harga Komoditas Pangan di seluruh Kabupaten/Kota bervariasi, sampai dengan minggu ke 1 November 2022, cabai merah menjadi komoditas yang menyumbang kenaikan harga di 252 Kabupaten/Kota, cabai rawit di 176 Kabupaten/Kota dan daging ayam ras di 162 Kabupaten/Kota dan telur ayam ras di 120 Kabupaten/Kota, selebihnya tersebar pada berbagai komoditas pangan seperti: bawang merah di 106 Kabupaten/Kota, beras di 90 Kabupaten/Kota, mie instan di 77 Kabupaten/Kota, minyak goreng di 73 Kabupaten/Kota.
5. Fluktuasi harga komoditas bahan pangan tertinggi untuk Kabupaten/Kota adalah Cabai Merah, Cabai Rawit dan Tahu Mentah adalah 3 (Tiga) komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu ke-1 November 2022. Fluktuasi harga 3 (Tiga) komoditas tersebut terjadi di 45 s/d 65 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, 50 Kabupaten/Kota selama minggu ke-1 November tidak mengalami fluktuasi harga (Stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau, Hanya terdapat 4 Kabupaten/Kota, dimana Daging Sapi adalah komoditas yang berfluktuasi harganya selama minggu ke-1 November 2022.
6. Daerah dengan inflasi bulan Oktober 2022 yang terendah, terbaik, diminta kepada Gubernur Maluku Utara, Walikota Ternate, Bupati Sumba Timur untuk dapat menyampaikan Best Practice pengendalian inflasi di daerah.
7. Khusus Gubernur Sumatra Barat, Walikota Kupang, Bupati Bulungan sebagai Daerah dengan inflasi bulan Oktober 2022 yang Tertinggi, terbaik, diminta untuk dapat menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan.
8. Komoditas yang memerlukan perhatian khusus minggu ini adalah beras, minyak goreng, kedelai dan bawang merah, perkembangan harga kebutuhan pokok sebagian besar pada tanggal 4 November 2022 berada pada tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan lalu dan minggu lalu perlu diwaspadai pada kedelai dan bawang merah.
9. Terdapat 103 Daerah yang belum tergabung dengan Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan pokok (SP2KP) dan 9 Daerah yang sudah mengisi data pengajuan username dan password.
10. Strategi pembangunan pertanian mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan antara lain :
 - Peningkatan Kapasitas Produksi.
 - Diversifikasi Pangan Lokal.
 - Penguatan Cadangan dan Sistem Logistik Pangan.
 - Pengembangan Pertanian Modern & Gerakan Tiga Kali Ekspor.
11. Terkait dengan evaluasi Pelaksanaan Pelaporan minggu I November 2022 dari 514 Pemerintah Daerah terdapat 20 Pemda tidak menyampaikan laporan harian perkembangan harga sepanjang minggu I November dan 56 Pemda pada minggu

I November belum melakukan/pelaporan upaya dalam penanganan inflasi di daerah.

12. Periode Oktober 2022 terjadi Deflasi 0,11% sehingga angka Inflasi nasional mengalami kenaikan menjadi 5,71%, 90 Pemda mengalami inflasi dan inflasi tertinggi Kabupaten Bulungan 9,11% Inflasi terendah Kota Ternate 3,32%.

13. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Per 4 November 2022 yaitu:

- Dari 415 Kabupaten yang mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, 351 daerah telah melakukan realisasi, sementara 64 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).
- Dari 93 Kota Yang Mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, 81 daerah telah melakukan realisasi, sementara 12 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

14. Persentase Realisasi Belanja Bansos APBD Kota Se-Indonesia Per 4 November 2022, dari 93 Kota yang mengalokasikan Anggaran Untuk Belanja Bantuan Sosial, 73 daerah telah melakukan realisasi, sementara 20 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

15. Dapat diketahui bahwa total Dana Desa seluruh Indonesia Tahun 2022 sebesar RP. 68T dengan penyaluran Dana Desa per tanggal 28 Oktober 2022 sebesar Rp.57,97T (85,26%).

16. Gambaran Perkembangan Kasus Covid-19 di Indonesia, Atensi untuk Pemerintah Daerah antara lain :

- Pemerintah Daerah melaksanakan Percepatan Vaksinasi Dosis Lanjutan (BOOSTER) di wilayahnya masing-masing.
- Pemerintah Daerah agar tetap mengantisipasi aktivitas-aktivitas yang padat (banyak orang) dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, sehingga tidak menimbulkan cluster baru penyebaran Covid-19.
- Pemerintah Daerah agar tetap mengingatkan kembali gerakan 3M (Memakai masker, Mencuci tangan dan menghindari kerumunan) dan bekerja sama berbagai sekor).
- Perlu Peran serta masyarakat terutama kerelaan untuk melaporkan secara mandiri lokasi dan riwayat perjalanannya selama pandemi di dalam Aplikasi Peduli lindungi untuk membantu penguatan 3T (Testing, Tracing, dan Treatment).
- Pemerintah Daerah segera melakukan langkah-langkah penyerapan anggaran TA. 2022 yang berfokus untuk penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi.

17. Kunci Penanganan Pandemi Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi antara lain :

- Kekompakan Forkopimda beserta seluruh elemen masyarakat.
- Analisa dan Evaluasi Rutin.
- Kepemimpinan Lapangan.

9. Pada tanggal 14 November 2022 mengikut Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah minggu ke empat membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah, yang dilaksanakan secara Zoom Meeting, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak

PJ.Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Diminta kepada Gubernur Papua Barat, Bupati Indragili Hilir sebagai Daerah dengan inflasi rendah pada Bulan Oktober 2022 untuk dapat menyampaikan hambatann atau kendala dalam penanganan infasi dan upaya yang akan dilakukan dan Gubernur NTT, Bupati Kota Baru sebagai Daerah dengan inflasi tinggi pada Bulan Oktober 2022 untuk dapat menyampaikan hambatann atau kendala dalam penanganan infasi dan upaya yang akan dilakukan.
2. Sebagian besar Perkembangan harga barang kebutuhan pokok nasional Per 11 November 2022 berada dalam kondisi yang stabilbahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu kecuali Bawang Merah dan Kedelai yang memerlukan perhatian khus
3. Indeks Perkembangan harga Kabupaten/Kota penyumbang kenaikan harga komoditi pangan di seluruh Kabupaten/Kota bervariasi sampai dengan minggu kedua November 2022, bawang merah merupakan komoditas menyumbang kenaikan harga di 149 Kabupaten/Kota, telur ayam ras di 135 Kabupaten/Kota dan daging ayam ras di 104 Kabupaten/Kota dan selebihnya pada komoditas pangan seperti minyak goreng di 102 Kabupaten/Kota, cabai rawit di 81 Kabupaten/Kota, cabai merah di 68 Kabupaten/Kota.
4. Fluktuasiharga komoditas bahan pangan tertinggi pada Bulan Oktober 2022, cabai merah, cabai rawit dan bawang merah adalah 3 komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu ke-2 November 2022 di 42 s/d 129 Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, di 17 Kabupaten/Kota, selama minggu ke-2 November tidak mengalami fluktuasi harga (stabil) pada 20 komoditas pangan yang dipantau dan cabai merah dan udang basah merupakan komoditas yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama mingguke-2 November2022 terdapat di 14 Provinsi di Ind
5. Terdapat 10 Kabupaten/Kota dengan indeks perubahan harga (kenaikan harga) tertinggi antara lain Provinsi Jambi Kabupaten Sarolangun, Provinsi Aceh Kabupaten Aceh Besar dan Kab. Pidie, Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Toraja Utara dan Kab Makasar, Provinsi Sumatra Selatan Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kota Banda Aceh, Provinsi Papua Kepulauan Yape, Sumatra Selatan Kabupaten Banyu Asin dan Provinsi Gorontalo Kota Gorontalo.
6. Terkait dengan Kabupaten Sarolangun termasuk 10 Kabupaten/Kota dengan indeks perubahan harga (kenaikan harga) tertinggi, diminta kepada BPS dan OPD terkait untuk dapat mengetahui penyebab Kabupaten Sarolangun termasuk dalam daftar tersebut karena dilihat dari perubahan harga dari awal November tidak mengalami kenaikan harga yang senifikan.
7. Kepada Dinas Perindag agar dapat melaksanakan pemantauan harga pangan di pasar setiap hari dan melaporkan hasil pemantauan harga kepada Kepala Daerah dan Kementrian setiap harinya.
8. Pemerintah mengoptimalkan Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah oleh Bulog sebagai langkah mitigasi kenaikan harga Beras, secara nasional, harga beras medium masih menunjukkan tren kenaikan,sejumlah daerah masih mencatat kenaikan harga, Pemerintah Daerah perlu mengoptimalkan intervensi pasar melalui intstrumen KPSH terutama bagi daerah yang harga beras Medium naik di atas HET.
9. Pemerintah Daerah juga perlu memperkuat pengawasan penyaluran Minyak Goreng diwilayah masing-masing sesuai datapenyaluran,Harga minyak goreng curah dua minggu terakhir terpantau dalam tren meningkat dan perlu kewas
10. Langkah-Langkah Tindak lanjut untuk Menjaga Stabilitas Harga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi Daerah yang harus dilakukan antara lain :

- Melaporkan hasil pemantauan harga komoditas bahan pokok & penting setiap hari
- Merealisasikan Belanja Tidak Terduga untuk dukungan pengendalian Inflasi
- Memberikan bantuan transportasi dari APBD
- Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait dengan melihat komoditas yang memberikan andil dalam kenaikan harga/inflasi
- Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
- Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
- Melaksanakan pencairan gerakan menanam

11. Kemendag menghimbau bagi Provinsi yang mayoritas penduduk merayakan HBKN agar segera melaksanakan Rakor dan upaya persiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional Natal dan Tahun Baru HBKN untuk mengidentifikasi kesiapan daerah masing-masing dalam menghadapi HBKN Natar

10. Pada tanggal 21 November 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah minggu ke Lima membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara Zoom Meeting, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Inflasi daerah saat ini menjadi isu yang sangat penting, karena inflasi mengakibatkan dampak yang sangat besar bagi beberapa Negara yang mengalami inflasinya naik turun, di Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi sosial yang ditentukan oleh kinerja dari Pemerintah Pusat dan seluruh stakeholders di daerah.
2. Pada Bulan Oktober inflasi Indonesia sebesar 5,72% sedangkan Bulan September sebesar 5,95%, artinya mengalami penurunan, berkat kerjasama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
3. Dimana Setiap daerah sudah sesuai menggunakan dana inflasi baik untuk kegiatan operasi pasar, belanja terduga, abntuan sosial serta inflasi lainnya termasuk trasportasi.
4. Secara Nasional ketersediaan bahan pangan strategis selama bulan Januari s/d Desember 2022 masih cukup aman.
5. Setiap Daerah dapat untuk data memanfaatkan secara optimal penggunaan dana BTT guna penekanan pengendalian inflasi di daerah, dan dana Bansos agar dapat digunakan dan dimanfaatkan terutama membantu masyarakat miskin atau kurang mampu.
6. Alokasi Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dan Bantuan Sosial (Bansos) APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022 Realisasinya dan penyerapan anggaranya masih rendah bahkan masih ada daerah yang realisasinya masih belum tersalurkan.
7. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Per 21 November 2022 yaitu:
 - Dari 508 Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, 432 daerah telah melakukan realisasi, sementara 76 daerah lainnya belum melakukan realisasi.
 - Dari 415 Kabupaten yang Mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, 351 daerah telah melakukan realisasi, sementara 64 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).
 - Dari 93 Kota yang Mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Tidak Terduga, 81 daerah telah melakukan realisasi, sementara 12 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

8. Persentase Realisasi Belanja Bansos APBD Kabupaten dan Kota Se-Indonesia Per 21 November 2022 yaitu:

- Dari 508 Kabupaten/Kota yang mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Bansos, 414 daerah telah melakukan realisasi, sementara 94 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).
- Dari 415 Kabupaten yang Mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Bansos, 341 daerah telah melakukan realisasi, sementara 74 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).
- Dari 93 Kota yang Mengalokasikan Anggaran untuk Belanja Bansos, 73 daerah telah melakukan realisasi, sementara 20 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).

9. Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok Nasional sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 18 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil bahkan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan bulan lalu dan minggu lalu kecuali Bawang Merah dan Kedelai yang memerlukan perhatian khusus.

10. Terkait dengan Daerah dengan inflasi rendah yaitu Gubernur DKI Jakarta dan Walikota Tual pada Bulan Oktober 2022 untuk dapat menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan dan Daerah dengan inflasi tinggi pada Bulan Oktober 2022 Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati Sintang untuk dapat menyampaikan hambatan atau kendala dalam penanganan inflasi dan upaya yang akan dilakukan.

11. Meskipun inflasi sudah mulai turun secara nasional tetap kita harus mengantisipasi agar tidak terjadi kenaikan inflasi pada bulan November dan Desember.

12. Pemerintah Pusat menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk dapat kerjasama, kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota agar dapat mengendalikan dan monev angka inflasi di daerah masing-masing sehingga inflasi dapat segera berakhir untuk terus menjaga penurunan inflasi, agar inflasi nasional tetap terjaga.

13. Diharapkan kepada semua daerah untuk dapat melaksanakan terobosan, mewaspadai dan memantau perkembangan harga bahan pangan menghadapi Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

11. Pada tanggal 22 November 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID dan Satgas Pangan, membahas Realisasi Dana BTT untuk pengendalian inflasi serta kesiapan menghadapi Hari Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru Tahun 2023 (Nataru), yang dipimpin langsung oleh Bapak Pj. Bupati Sarolangun di hadir oleh Forkompinda, Anggota TPID dan Satgas Pangan Kabupaten Sarolangun dan beberapa OPD terkait, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Menindaklanjuti hasil rapat (*zoom meeting*) dengan Kemendagri, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian khusus yaitu masih terdapat beberapa daerah yang belum merealisasikan dana BTT untuk kegiatan pengendalian inflasi, salah satunya Kabupaten Sarolangun yang sampai saat ini belum merealisasikan sama sekali.
2. Terkait dengan Pelaksanaan Dana BTT untuk perlindungan sosial akibat dampak inflasi sebesar Rp. 4.4 Milyar, OPD terkait agar segera menindaklanjuti dan diharapkan dalam

jangka waktu 2 minggu OPD terkait sudah dapat melaksanakan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan.

3. Berdasarkan Indeks perkembangan harga (IPH) yang dirilis BPS, Kabupaten Sarolangun termasuk dalam 10 besar Kabupaten/Kota yang memiliki IPH tertinggi, dimana sampai minggu kedua berada pada peringkat I dan pada minggu ketiga berada pada peringkat 5. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi TPID dan Satgas Pangan untuk terus bekerja secara maksimal untuk menstabilkan harga pasar.
4. Kepada Dinas Koperindag agar secara periodik (setiap hari) memantau harga pasar dan mengingatkan petugas pencatat untuk lebih teliti dalam mencatat perkembangan harga dan pelaporan secara online melalui aplikasi SP2KP, karena hal ini berpengaruh terhadap tinggi rendahnya IPH. Selanjutnya dalam pemantauan harga fokus terhadap 20 komoditi terpilih yang telah ditetapkan.
5. Dinas Ketahanan Pangan untuk dapat memantau ketersediaan stok pangan di daerah agar tidak terjadi kekurangan kebutuhan pangan, apabila daerah kekurangan kebutuhan agar dapat segera bekerjasama dengan daerah yang surplus pangan, selain dengan Kabupaten Tanah Datar dapat juga bekerjasama dengan daerah lain seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Curup.
6. Dinas Koperindag dan Bagian PSDA agar dapat mengatur jadwal sidak/Pemantauan pasar guna memantau kenaikan dan ketersediaan/stok bahan pangan menghadapi Hari Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru Tahun 2023 (Nataru).
7. Dinas Koperindag agar dapat menyusun jadwal Operasi Pasar di beberapa Kecamatan, dimana pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan Bulog atau dengan cara memanfaatkan/menggunakan dana Operasi Pasar pada dana BTT pengendalian Inflasi.
8. Diperkirakan ketersediaan Stok beras di Bulog di seluruh Indonesia diprediksi akan kekurangan stok beras, tetapi untuk kebutuhan beras di Bulog Sarko masih tersedia dan aman sekitar 20 Ton, selanjutnya Bulog Sarko siap apabila sewaktu-waktu diminta untuk Operasi Pasar di setiap Kecamatan dalam Kabupaten Sarolangun.
9. Sesuai arahan Kemendagri langkah-langkah yang harus dilakukan daerah untuk menjaga stabilitas harga dalam rangka Pengendalian Inflasi Daerah antara lain :
 - Memperluas Kerjasama Antar Daerah (KAD) terutama untuk daerah surplus/defisit dalam menjaga ketersediaan suplai komoditas.
 - Melaksanakan Operasi Pasar dalam memastikan keterjangkauan harga dengan melibatkan berbagai stakeholder.
 - Pemanfaatan Platform perdagangan digital untuk memperlancar distribusi.
 - Menggunakan anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) dalam pengendalian Inflasi, mengoptimalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk tematik ketahanan pangan dan pemanfaatan 2% Dana Transfer Umum (DTU) untuk membantu sektor transportasi dan tambahan perlindungan sosial.
 - Mempercepat implementasi program tanampangan pekarangan (misalnya cabai), untuk mengantisipasi tingginya permintaan di akhir tahun.
 - Menyusun Neraca Komoditas Pangan Strategis oleh seluruh Pemerintah Daerah.
 - Memperkuat sarana-prasarana penyimpanan produk hasil panen (misalnya Cold Storage) terutama di daerah sentral produksi.
 - Memperkuat sinergi TPIP-TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) untuk mempercepat stabilitas harga
12. Pada tanggal 28 November 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah mingguan yang ke enam membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah yang dilaksanakan secara Zoom Meeting, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung

oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Potensi inflasi terus membesar sejak minggu pertama hingga minggu ke-4 November 2022, Perkembangan harga telur ayam ras menjadi komponen yang menyumbang kenaikan harga di 166 Kabupaten/Kota dan Daging ayam ras di 128 Kabupaten/Kota.
2. Pada Bulan November 2022 disparitas harga antar terjadi di wilayah timur Indonesia, dengan jumlah yang lebih sedikit dibandingkan Bulan Oktober, cabe merah dan cabe rawit adalah komoditi yang fluktuasi harganya cukup signifikan selama minggu ke-4 November 2022 terjadi di 97 Kabupaten dan 109 Kota seluruh Indonesia dan 25 Kabupaten/Kota mengalami fluktuasi harga stabil.
3. Perkembangan harga 20 komoditi pangan di Bulan November 2022 Tren kenaikan inflasi didorong naiknya permintaan konsumen menjelang Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, permintaan konsumen menjelang Natal dan Tahun baru serta dampak kenaikan harga BBM, bahkan fluktuasi harga dapat juga terjadi disebabkan terganggunya pasokan.
4. Diharapkan setiap daerah perlu mempersiapkan teknologi untuk memperpanjang masa simpan dan mempertahankan kualitas hortikultura, melakukan percepatan distribusi pangan antar wilayah serta penguatan stock pangan di daerah.
5. Saat ini diperkirakan stok pangan yang sangat sedikit dibandingkan kebutuhan bulanan nasional di Bulog terutama untuk stok beras akan mengalami kekurangan stok.
6. Rata-rata harga pangan nasional secara umum dalam kondisi stabil, namun terjadi tren peningkatan pada komoditi beras premium, beras medium, kedelai dan telur ayam ras, daerah diharapkan terus berupaya dalam menstabilkan harga dan pasokan melalui berbagai aksi dan kebijakan di daerah.
7. Kementerian pertanian telah penyediaan komoditas pertanian untuk pengendalian harga dan inflasi di daerah dengan cara peningkatan kapasitas produksi, perbanyak benih, penyediaan sprodik, penyediaan dan pengelolaan alsintan, pemberian pupuk subsidi dan perkuat kinerja penyuluh.
8. Sebagian besar harga bahan pangan kebutuhan pokok per 25 November 2022 berada dalam kondisi yang stabil dan dalam tren penurunan yang signifikan jika dibandingkan dengan bulan lalu dan minggu lalu kecuali bawang merah yang memerlukan perhatian khusus oleh kepala Daerah.
9. Setiap daerah harus dapat waspada terjadinya potensi peningkatan harga minyak goreng, Pemerintah Daerah perlu melakukan peningkatan pengawasan penyaluran minyak goreng di daerah, dan apabila di daerah ditemukan hambatan distribusi dan masih ditemui penjualan minyak goreng di atas HET dapat langsung berkoordinasi dan menyampaikan asil pengawasannya kepada Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.
10. Kemendagri menugaskan kepada Bulog untuk dapat memberikan bantuan kedelai sebesar Rp. 17.000 bagi pengrajin tahu dan tempe di daerah.
11. Diminta kepada Daerah untuk melaksanakan langkah-langkah guna mengatasi inflasi di daerah antara lain Operasi pasar, sidak pasar dan distributor, panen raya, gerakan menanam cabai dan sayuran melalui Kelompok Wanita Tani.
12. Pemerintah Daerah segera melaksanakan rapat menyambut menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru), melaksanakan pemantauan dan sidak pasar terutama harga dan stok pangan di daerah agar tidak terjadi kenaikan harga dan kekurangan stok pangan di daerah, melaksanakan operasi pasar, pengawalan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan APBD untuk pengendalian Inflasi Daerah.

13. Pada tanggal 28 November 2022 dilaksanakan Rapat terkait Percepatan Realisasi Dana BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan OPD terkait Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Kabag Kesra :

- Jumlah total rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bagian Kesra adalah senilai Rp. 1.134.000.000,- dengan rincian:
- Bantuan untuk Pegawai syarak : 120 orang @ 1000,-/bulan x 3 bulan = Rp.54.000.000,-
- Bantuan untuk Guru ngaji : 1.006 orang @ 1000,-/bulan x 3 bulan = Rp.452.700.000,-
- Bantuan untuk Guru Pesantren : 974 orang @ 1000/bulan x 3 bulan = Rp.438.300.000,-
- Bantuan untuk Marbot : 420 @1000,-/bulan x 3 bulan= Rp.189.000.000,-
- Data pendukung (administrasi) untuk pelaksanaan kegiatan ini telah dipersiapkan, dalam waktu dekat akan segera diajukan ke BPKAD.
- Pola penyaluran bantuan untuk guru pesantren rencananya akan dilaksanakan dengan mengirim bantuan ke rekening atas nama Pondok Pesantren.
- Sedangkan Bantuan untuk pegawai syara, guru ngaji dan marbot rencananya akan disalurkan secara tunai. Hal ini mengingat sebagian calon penerima tidak memiliki rekening.

2. Dinas pendidikan :

- Rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan adalah Bantuan terhadap Guru Honor Dana BOS SD dan SMP sebanyak 801 guru @150.000,-/bulan x 3 bulan = 360.450.000,-
- Untuk pencairan menggunakan rekening non tunai belum siap rekening namun untuk pembayaran secara tunai, dinas siap pembayaran melalui menggunakan kuitansi bernama penerima. (coba Tanya lagi penyaluran tunai apan non tunai, pastikan)

3. Dinas Perindag :

- Dinas Perindagkop berencana untuk mencairkan Dana BTT senilai Rp. 588.070.000 untuk kegiatan operasi pasar di 5 (lima) Kecamatan Dalam Kabupaten Sarolangun.
- Sedangkan untuk Subsidi UMKM, Dinas Perindagkop belum mengusulkan.

4. Dinas TPHP :

- Rencana kegiatan Dinas TPHP adalah Kegiatan pengawalan cabe merah berupa pembelian mulsa senilai Rp. 56.000.000,-.
- Bantuan diberikan kepada kelompok tani.
- Pengadaan mulsa dilakukan melalui toko daring .

5. Dinas Peternakan dan Perikanan

- Kegiatan yang akan diusulkan Dinas Nakkan adalah Pemberian bantuan bibit ayam kepada kelompok Tani ternak senilai Rp. 100.000.000,-
- Penyaluran dana bantuan langsung di kirim ke Rekening Kelompok Tani
- Usulan pencairan dana BTT akan segera dibuat/ disiapkan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

6. Dinas Ketahanan Pangan ;

- Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DKP adalah Pemberian subsidi harga kedelai untuk UMKM pangan khususnya pengrajin tahu dan tempe senilai Rp. 96.600.000,-
- Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Lokal senilai Rp. 75.000.000,-

7. Dinas Perhubungan ;

- Kegiatan yang diusulkan berupa pemberian subsidi transportasi untuk Angkutan Desa Sebesar Rp. 25.200.000,-
- Penyaluran ke penerima dilakukan secara non tunai
- Kegiatan sudah diusulkan dan sudah dieksekusi pencairannya oleh BPKAD

8. Dinas Nakertrans :

- Mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan, Dinas Nakertrans tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga Kerja seperti yang telah direncanakan.

9. BPKAD ;

- SK PA dan Bendahara sudah disiapkan.
- Rekening BTT khusus terpisah dari rekening kegiatan/operasiol setiap
- Pencairan BTT direncanakan dicairkan secara LS
- OPD segera menaikan nota dinas ke bupati hari senin tanggal 28 November 2022 dan segera diproses oleh OPD masing-masing ke DPKAD.

10. Pendapat Inspektur:

- Untuk bantuan sosial ini, sepanjang tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya diperbolehkan untuk dilaksanakan.

11. Pendapat Kabag Hukum ;

- Berdasarkan surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 840/5412/SJ tanggal 12 September 2022 tentang petunjuk Teknik pengelolaan belanja bantuan sosial dalam rangka pengendalian inflasi di daerah,, “gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan Bansos kepada bupati/walikota untuk menghindari terjadinya duplikasi penyaluran Bansos yang telah dilakukan oleh kabupaten/walikota.
- Sumber dana yang sama untuk nama orang yang sama tidak dapat disalurkan.

12. Sekretaris Daerah ;

- Nota Dinas masing-masing OPD yang ingin mengusulkan kegiatan dimaksud agar dapat segera disiapkan.
- Pembayaran secara Non Tunai langsung ke rekening bersangkutan/penerima.
- Perindag bekerjasama dengan pihak Bulog Sarko untuk Operasi Pasar.
- Pelaksanaan kegiatan agar dapat Koordinasi dengan Kabupaten terdekat yang telah merealisasikan Dana BTT untuk inflasi.

13. Arahan Bapak Pj Bupati ;

- Agar pelaksanaan dilaksanakan mengacu peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Agar penyaluran ini dilakukan secara non tunai. Jika tidak memungkinkan secara non tunai karena alasan tertentu, agar pelaksanaannya dilaksanakan tepat sasaran *By Name By address* dilengkapi dengan bukti-bukti yang valid.
- Agar Dinas Perindagkop dapat segera merevisi rencana kerja dan Biaya kegiatan Operasi Pasar yang diusulkan.
- Agar kegiatan Operasi Pasar dapat bekerjasama dengan Bulog.

14. Pada tanggal 05 Desember 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah mingguan yang ke Enam untuk membahas langkah kongkret Pengendalian Inflasi di Daerah sebagai tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden RI, yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kemendagri Jakarta Pusat, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Kondisi terkini perkembangan inflasi di Indonesia pada bulan November 2022 mencapai 5,42% yoy lebih rendah dibandingkan pada bulan Oktober 2022 yang tercatat 5,71 %, sektor transportasi menjadi faktor penyumbang kenaikan inflasi.
2. Pada Bulan November 2022 terdapat 5 daerah dengan tingkat inflasi yang tertinggi antara lain Daerah Kota Bukit Tinggi (7,06%), Serang (6,77%), Lember (6,79%), Kota Baru (8,02%), tanjung Solor (7,78%)
3. Peran Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP-TPID) dalam Pengendalian Inflasi, dimana Relisasi angka inflasi pada November 2022 berada dibawah prakiraan awal, dimana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Inflasi November 2022 tercatat rendah sebesar 0,09% (mtm).
4. Perkembangan positif inflasi tidak terlepas dari pengaruh sinergi kebijakan yang makin erat antara Pemerintah Pusat dan daerah, Bank Indonesia serta berbagai mitra strategi lainnya melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID) serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) dalam menurunkan inflasi di Daerah.
5. Dari 9 (Sembilan) Langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Setiap Daerah terdapat 6 (enam) upaya yang sifatnya sangat kongkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi di daerah antara lain :
 - Melaksanakan Operasi Pasar Murah
 - Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
 - Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
 - Gerakan menanam
 - Merealisasikan BTT.
 - Dukungan transportasi dari APBD.
6. Hasil Monitoring dari 514 Pemerintah Kabupaten/Kota masih terdapat 52 Pemerintah Daerah yang belum melakukan sama sekali upaya yang kongkrit dalam mengatasi pengendalian inflasi di daerah.
7. Harga komoditas cenderung akan terus tinggi hingga tahun 2030, Pemerintah harus memastikan kelancaran distribusi komoditas yang masih bergantung dari impor komoditas yang dapat dipenuhi dari dalam negeri perlu dipetakan dengan baik, harus dirancang sinergi kebijakan agar tercapai keseimbangan mekanisme pasar.

8. Kementerian Perdagangan menugaskan Perum BULOG untuk menyalurkan dan melakukan pendistribusian beras medium melalui pelaksanaan Ketersediaan Pasokan dan Stabilisasi Harga di seluruh wilayah Indonesia dengan harga penjualan di tingkat konsumen akhir paling tinggi sesuai dengan HET Beras Medium dan Perum BULOG berkomitmen untuk terus menjaga kecukupan stok beras secara nasional sampai dengan akhir tahun 2022.

9. Selama 5 tahun terakhir, realisasi inflasi selalu di bawah batas atas target Pemerintah, pada Tahun 2022 angkainflasi kemungkinan besar di atastarget Pemerintah

10. Dari segi fiskal Pemerintah menambah dan memperluas Bansos untuk menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah juga berkolaborasi untuk menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.

12. Untuk Stok beras dilihat dari hasil pengecekan Satgas Daerah bahwa stok beras masih aman dan harga masih stabil dalam bulan November, dan secara Nasional ketersediaan pangan strategis selama Januari s/d Desember 2022 cukup aman.

13. Strategi Baru Kementerian Pertanian menghadapi krisis pangan dunia dan peningkatan daya saing berkelanjutan antara lain :

- Peningkatan kapasitas produksi pangan untuk komoditas pengendali inflasi seperti cabai dan bawang merah, serta untuk mengurangi impor seperti kedelai, jagung, gula tebu, dan daging sapi.
- Pengembangan pangan substitusi impor seperti ubi kayu, sorgum, dan sagu untuk substitusi gandum, domba/kambing dan itik untuk substitusi daging sapi.

14. Pemerintah Pusat meningkatkan kepada Pemerintah Daerah terkait menghadapi HBKN Natal dan Tahun Baru, untuk dapat mengendalikan inflasi daerah yang dapat mengakibatkan kenaikan harga kebutuhan bahan pokok menjaga seluruh komponen bahan pokok dan harga stabil, guna mengatasi inflasi di penghujung tahun dengan mengoptimalkan APBD untuk kegiatan subsidi transportasi, operasi pasar/pasar mura, turun ke pasar dan distributor, pastikan kelancaran arus logistic barang, kecukupan stok dan stabilitas harga kebutuhan pokok ada periode, Nataru, sinergi dan kolaborasi, Kerjasama Antar Daerah adalah kunci pengendalian inflasi di daerah.

15. Pada tanggal 05 Desember 2022 dilaksanakan Rapat koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun terkait Percepatan Realisasi Dana BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah, dipimpin langsung oleh Bapak Sekretaris Daerah yang dihadiri oleh Anggota TPID dan OPD terkait Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Bagian Kesra :

- Jumlah total kegiatan yang sudah dicairkan oleh Bagian Kesra adalah senilai Rp. 492.300.000,- dengan rincian:
- Bantuan untuk Pegawai syarak : 120 orang @ 1000,-/bulan x 3 bulan = Rp.54.000.000,-
- Bantuan untuk Guru Pesantren : 974 orang @ 1000/bulan x 3 bulan = Rp.438.300.000,-
- Pola penyaluran bantuan untuk pegawai syara dan guru pesantren akan di transfer ke rekening khusus inflasi yang sudah dibuat, dan dalam minggu ini akan di transfer ke rekening Pondok Pesantren dan Pegawai Syarak Kelurahan penerima bantuan.
- Sedangkan Dana BTT yang tidak dicairkan oleh Bagian Kesra adalah sebesar Rp. 000.000,- dengan rincian :

Bantuan untuk Guru ngaji : 1.006 orang @ 1000,-/bulan x 3 bulan = Rp.452.700.000,-

- Bantuan untuk Marbot : 420 @1000,-/bulan x 3 bulan= Rp.189.000.000,-
- Belum dapat diajukan alasannya karena berpotensi tumpang tindih dengan bantuan Dana BKBK dari Provinsi. (Hasil koordinasi BPKAD dengan BPKP Provinsi Jambi tidak dibenarkan untuk dicairkanapa bila dengan nama yang sama), untuk itu perlu verifikasi data lebih lanjut agar tidak tumpang tindih.

1. Dinas pendidikan :

- Bantuan Sosial untuk Guru Honor Dana BOS SD dan SMP sebanyak 801 Guru @150.000,-/bulan x 3 bulan = 360.450.000,-sudah cair dan sudah dikirim ke rekening Khusus di Diknas, dan hasil rapat hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 bersama Kepala Sekolah, disepakati Dana BTT tersebut akan disalurkan ke Rekening Kepala Sekolah, direncanakan minggu ini dana akan langsung di transfer/dialurkan ke rekening Kepala Sekolah masing-masing.
- Pihak Sekolah dikasih tempo untuk menyerahkan Bukti Penerimaan atau SPJ Penyaluran Dana BTT dari Kepala Sekolah ke pada guru honorer di Sekolah.

1. Dinas TPHP :

- Pengawalan Cabe Merah (Pengadaan Mulsa) sebesar 56.000.000, Dana BTT untuk pembelian Pengadaan Mulsa sudah dicairkan dan saat ini sedang dalam tahap pengadaan mulsa untuk kemudian disalurkan kepada Kelompok Tani.

1. Dinas Ketahanan Pangan, Kegiatan yang diajukan berupa :

- Pemberian bantuan kepada KWT sebanyak Rp. 75.000.000,- atau Rp. 15.000.000,-/ KWT
- Pemberian Subsidi Harga Pangan, Pemberian subsidi di harga kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp. 96.000.000,-.
- Saat ini dalam tahap pembuatan rekening khusus penampungan.
- Direncanakan dalam minggu ini akan disalurkan.

1. Dinas Peternakan dan Perikanan :

- Kegiatan Kelompok Tani Ternak sebesar 100.000.000,-yang berupa pemberian bantuan kepada kelompok Tani ternak untuk pembelian Pakan dan bibit ayam (kira-kira umur 1 Bulan/ ± 4. on).
- Saat ini dalam proses pembuatan rekening kelompok dan selanjutnya dalam dua hari akan diajukan pencairannya ke BPKAD, untuk selanjutnya disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak.
- Penyaluran dana bantuan yang dilaksanakan secara ditrasfer langsung ke Rekening Kelompok Tani Ternak langsung.

1. Dinas Perhubungan :

Kegiatan subsidi transportasi Angkutan Desa sebesar Rp. 25.200.000, Dana BTT transportasi Angkutan Desa sudah dicairkan dan tinggal penyerahan kepada sopir Angdes yang direncanakan akan di salurkan pada minggu ini.

1. Dinas Perindag :

- Kegiatan Operasi Pasar sebesar 800.000.000yang direncanakan untuk pelaksanaan Operasi Pasar , masih dalam proses persiapan administrasi (Pembuatan SK, Juknis, Kreteria dan Rincian Kegiatan lainnya).
- Untuk kegiatan Operasi Pasar, Staf Dinas Perindagkop sekarang sedang turun ke lapangan/ke Kecamatan untuk mencari Distributor/Pedagang yang mau menjual harga barang di bawah harga pasar.
- Kegiatan Subsidi UMKM sebesar Rp. 495.000.000, masih dalam proses persiapan administrasi.

1. Dinas Nakertrans :

-

Bantuan Sosial untuk Pelatihan Tenaga Kerja Rp. 200.000.000, mengingat waktu yang tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan kegiatan, Dinas Nakertrans tidak dapat melaksanakan kegiatan pelatihan tenaga Kerja dan tidak mengajukan pencairan Dana BTT.

1. Arahan Sekretaris Daerah

Pengajuan diharapkan dilaksanakan secara non tunai namun jika tidak memungkinkan kelengkapan administrasinya (SPJ) merupakan prioritas utama dan pastikan bantuan diterima by name by address.

16. Pada tanggal 6 Desember 2022 menghadiri Undangan High Level Meeting (HLM) Akhir Tahun TPID Provinsi Jambi guna meningkatkan konsolidasi pada seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi dalam menghadapi Hari Besar Keagamaan (Natal dan tahun Baru 2023) di Kabupaten Bungo, dari Kabupaten Sarolangun yang turut hadir Bapak Sekretaris Daerah, Asisten Ekbang, Kepala BPKAD, Kepala Dinas TPHP, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Kabag Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Sarolangun.

17. Pada tanggal 7 Desember 2022 menghadiri acara Penyerahan Dana BTT kepada Guru pondok pesantren yang berjumlah 47 Pondok Pesantren dan 974 orang guru Pondok Pesantren dan 120 orang Pegawai Syarak di Kelurahan yang dilaksanakan oleh Bagian Kesra Setda Kabupaten Sarolangun, yang dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun dan di hadiri oleh Pimpinan dan Guru Pondok Pesantren, Pegawai Syarak, Kabag Perekonomian dan SDA, Pegawai Kecamatan Sarolangun dan Pegawai Kelurahan dalam Kecamatan Sarolangun.

18. Pada tanggal 12 Desember 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah mingguan yang ke Delapan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kemendagri Jakarta Pusat, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Pada Periode Bulan November 2022 terjadi Inflasi sebesar 5,42% atau melemah dibandingkan bulan Oktober sebesar 5,71% , Bulan November Inflasi tertinggi di kabupaten Bulungan sebesar 9,20% dan terendah di Kota Ternate sebesar 3,26%.
2. Dari 9 (Sembilan) Upaya konkrit yang harus dilakukan oleh Setiap Daerah terdapat 6 (enam) upaya yang sifatnya sangat kongkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan inflasi di daerah antara lain :
 - Melaksanakan Operasi Pasar Murah
 - Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang.
 - Kerjasama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.
 - Gerakan menanam, Merealisasikan BTT
 - Dukungan transportasi dari APBD.
1. Terdapat 91 Pemda telah melakukan 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan Inflasi daerah atau mengalami kenaikan 24 Pemda dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 67 Pemda.
2. Masih terdapat 30 Pemda belum melakukan sama sekali 6 (enam) upaya dalam Penanganan Inflasi daerah atau mengalami penurunan 27 Pemda dibandingkan minggu lalu sebanyak 57 Pemda.
3. Terdapat 25 Pemda yang tidak melaporkan perkembangan kenaikan harga pada Minggu ke II Desember dan penanganan Pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemda kepada Pemerintah.

Sampai dengan minggu ke 2 Bulan Desember 2022 cabe rawit menjadi komoditi yang

4.

menyumbang kenaikan inflasi harga di 151 Kabupaten/Kota , cabe merah di 149 Kabupaten/Kota, bawang merah di 123 Kabupaten/kota, dan telur ayam ras menjadi komoditi yang menyumbang kenaikan harga.

5. Secara Nasional ketersediaan pangan strategis selama Januari s/d Desember 2022 dari produksi dalam negeri cukup aman, namun untuk komoditas kedelai, bawang putih, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi masih harus dipenuhi dari impor.
6. Diharapkan kepada setiap Daerah untuk dapat mengantisipasi akhir tahun Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, akan ada kenaikan harga bahan pangan karena kenaikan permintaan.
7. Pemerintah Pusat dan Daerah agar meminor angka-angka tiap daerah terutama bagi daerah-daerah rawan dan membuat inovasi dan terobosan untuk berkolaborasi dalam penanganan inflasi di daerah.
8. Memanfaatkan Dana BTT dan Bansos secara optimal dengan pendampingan dari Kejaksaan, TNI, dan Polri.
9. Memanfaatkan asset-aset dalam mengantisipasi musim hujan yang dapat menghambat proses produksi dan distribusi.
10. Diharapkan kepada semua Kepala Daerah untuk dapat mengingatkan kepada OPD untuk memaksimalkan realisasi anggaran belanja daerah mengingat sudah akhir tahun.

19. Pada tanggal 12 Desember 2022 dilaksanakan Rapat Koordinasi TPID Kabupaten Sarolangun terkait Percepatan Realisasi Dana BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Rapat terkait Percepatan Realisasi Dana BTT untuk Pengendalian Inflasi Daerah, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Anggota TPID dan OPD terkait Kabupaten Sarolangun.
2. Anggaran Dana BTT untuk Perlindungan Sosial Akibat Inflasi sebesar Rp.404.629.702,- yang sudah dan belum terealisasi sampai tanggal 09 Desember 2022 dengan rincian sebagai berikut :
 - Dana BTT sudah terealisasi sebesar Rp. 1.104.950.000 (25, 09 %)
 - Dana BTT yang belum terealisasi sebesar Rp. 3.299.679.702,-
1. Dinas Perhubungan, Subsidi Transportasi Angdes sebesar 25.200.000,- kegiatan subsidi transportasi Angkutan Desa kepada 56 angdes, baru disalurkan kepada 54 orang sopir Angdes (07 Desember 2022) di Dinas Perhubungan, masih tersisa 2 Orang sopir Angdes yang belum disalurkan.
2. Bagian Kesra, Pegawai Syara' dan Guru Pondok Pesantren sudah diserahkan seluruhnya, dan secara simbolis oleh Bapak PJ. Bupati Sarolangun kepada Pegawai Syarak dan Guru Pondok Pesantren pada tanggal 07 Desember 2022 di Kantor Camat Sarolangun dan Bagian Kesra sudah menyiapkan Bukti/SPJ penyerahan Dana BTT kepada Pegawai Syarak dan Guru Pondok Pesantren.
 - Pegawai Syara' sudah di Salurkan sebesar 54.000.000,- (100 %) kepada 120 orang pegawai syarak Kelurahan Se-Kabupaten Sarolangun.
 - Guru Pondok Pesantren sudah disalurkan sebesar Rp. 438.300.000 (100 %) kepada 974 orang guru dari 47 Pondok Pesantren.
 - Sedangkan untuk Pegawai Marbot dan Guru Ngaji saat ini masih verifikasi data dan direncanakan pada tanggal 22 Desember 2022 akan diusahakan pengajuannya ke BPKAD.
 - Guru Ngaji sebesar 452.700.000,-
 - Pegawai Marbot sebesar 189.000.000,-

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Bantuan Sosial untuk Guru Dana BOS SD dan SMP, Dana BTT sebesar Rp. 360.450.000 sudah disalurkan, sampai saat ini pencapaian serapan yang sudah disalurkan sebesar 90 % dan tinggal beberapa sekolah di Kecamatan Batang Asai yang belum disalurkan direncanakan hari senin akan disalurkan dan Pihak Sekolah sudah menyiapkan Bukti/SPJ pengeluaran Dana BTT kepada Guru Honorer dan selanjutnya akan di serahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Dinas TPHP. Pengawasan Cabe Merah untuk Pengadaan Mulsa Petani sebesar 56.000.000, barang Pengadaan Mulsa sudah datang dari penyedia namun belum diserahkan kepada petani, yang rencana penyerahannya akan dilaksanakan bersamaan dengan rencana pelaksanaan tanam cabe.
 3. Dinas Ketahanan Pangan. Pekarangan Pangan Lestari dan Subsidi Harga Pangan dari Dana BTT sudah cair dan tinggal Overbooking ke rekening penerima bantuan Kelompok Wanita Tani dan pengrajin tahu dan temped an rencana hari ini akan di transfer ke rekening penerima.
 - o Pekarangan Pangan Lestari bantuan untuk Kelompok Wanita Tani sebanyak Rp. 75.000.000. atau Rp. 15.000.000,-/ KWT (dari Dana sebesar Rp.375.000.000 tersisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp. 300.000.000,-).
 - o Subsidi Harga Pangan, Pemberian subsidi di harga kedelai untuk pengrajin tahu dan tempe sebesar Rp. 96.000.000,-. (dari Dana sebesar Rp. 858.979.702,- tersisa dana yang tidak dicairkan sebesar Rp.762.979.702,-)
 1. Dinas Peternakan dan Perikanan, saat ini dalam perbaikan Nota Dinas Pengajuan Dana BTT sebesar 100.000.000,- yang akan disalurkan kepada Kelompok Tani Ternak untuk Pembelian bibit ternak ayam, yang selanjutnya akan diajukan pencairannya ke BPKAD.
 2. Dinas Koperasi dan Perdagangan, Operasi Pasar sebesar 800.000.000 dan Bantuan UMKM Rp.495.000.000 kedua kegiatan tersebut masih dalam proses persiapan bahan untuk syarat pengajuan dan direncanakan hari ini akan diajukan pencairan Dana BTT kegiatan Operasi Pasar dan Bantuan UMKM ke BPKAD.
 - o Operasi Pasar sebesar 800.000.000, akan dicairkan sebesar Rp.107.300.000,- (13,41%) dan sisa yang belum dicairkan sebesar Rp. 692.700.000,- dan pelaksanaan Operasi Pasar direncanakan akan dilaksanakan mulai hari Rabu 14 Desember 2022.
 - o Subsidi UMKM sebesar Rp.495.000.000 akan dicairkan sebesar Rp.468.000.000 dan sisa Dana yang tidak dicairkan sebesar 26.000.000,- dan setiap UMKM akan diberikan bantuan sebesar Rp. 600.000,- / UMKM.

A. Arahan Bapak PJ Bupati

1. Bagian Kesra Setda
 - o untuk dapat menyurati Pondok Pesantren menyampaikan kepada pimpinan Pondok Pesantren agar dapat menyalurkan Dana BTT seluruhnya tepat sasaran kepada Guru Pondok Pesantren, untuk dapat melengkapi bukti tanda terima dan foto dokumen penyerahan.
 - o Untuk Guru Ngaji dan Pegawai Marbot yang dalam verifikasi agar segera selesaikan dan diajukan pencairannya sesuai dengan aturan.
1. Dinas Koperasi dan Perdagangan
 - o Untuk pelaksanaan Operasi Pasar yang akan dilaksanakan mulai hari rabu tanggal 14 Desember 2022, tidak dibenarkan pemunggutan untuk operasional dan uang lainnya.
 - o Penyaluran untuk UMKM yang menerima agar tepat sasaran atau UMKM yang benar-benar ada usahanya (cek masing-masing usaha), untuk besaran dana atau acuannya disesuaikan dengan Kabupaten lain.
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 1.

Penyaluran untuk guru honorer Dana Bos pihak sekolah agar dapat melengkapi Bukti/SPJ penyaluran berupa bukti kwitansi tanda terima foto dokumen, dan penyalurannya harus tepat sasaran.

1. Dinas TPHP.

- Untuk rencana penyerahannya dapat kasih duluan atau sebagiandapat diserahkan pada saat rencana pelaksanaan tanam cabe.
- Acara tanam cabe untuk dapat mengundang Forkopinda dan Ketua/Anggota DPRD.

1. Menghadapi Nataru.

- Menghadapi Nataru Bagian Perekonomian agar dapat mengatur waktu sidak pasar Sarolangun dan Pasar Singkut hari Kamis dan Jumat.
- Inspektorat laporan perkembangan harga untuk dapat dilaksanakan dan dilaporkan setiap hari.
- Untuk setiap acara Tim TPID turun agar dapat mengundang Forkopinda dan Anggota DPRD.

20. Pada tanggal 19 Desember 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah mingguan yang ke Sembilan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kemendagri Jakarta Pusat, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak Staf Ahli Bupati Bidang Keubang Kabupaten Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :

1. Perkembangan Inflasi Indonesia Bulan November 2022 tekanan inflasi melemah inflasi Tahun ke Tahun sebesar 5,42%, inflasi Tahun kelender 4,82 % sedangkan inflasi Bulan ke Bulan sebesar 0,09 %, Indonesia masuk ke dalam peringklat ke 147 dari 186 Negara di dunai dengan tingkat inflasi tertinggi.
2. Indeks perkembangan harga dan fluktuasi harga komoditas bahan pangan sampai dengan minggu ke 3 Bulan Desember 2022 cabe rawit dan telur ayam ras menjadi komoditi yang menyumbang kenaikan harga di 20 Provinsi, sedangkan fluktuasi harganya cukup sinikfikan selama minggu ke III Desember 2022 cabe merah di 153 Kabupate/Kota, bawang merah di 116 Kabupate/Kota, beras di 102 Kabupate/Kota dan caber rawit 101 Kabupate/Kota.
3. Sebagian besar harga bahan pangan kebutuhan pokok per 16 Desember 2022 relative stabil, namun perlu kewaspadaan beberapa komoditas mulai mulai menunjukkan tren kenaikan harga singnifikan dibandingkan minggu lalu dan bulan lalu diantaranya telur ayam ras, daging ayam ras dan cabe.
4. Penyaluran Dana Desa seluruh Indonesia Tahun 2022 sebesar RP. 68 Triliun dengan penyaluran Dana Desa per tanggal 17 Desember 2022 sebesar Rp. 66,21 (97,37%).
5. Terdapat 112 Pemda telah melakukan 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan Inflasi daerah atau mengalami kenaikan 21 Pemda dibandingkan dengan minggu lalu yang hanya 91 Pemda dan 174 Pemda yang baru melakukan 4 s/d 5 upaya konkrit dalam penanganan Inflasi daerah.
6. Masih terdapat 18 Pemda belum melakukan sama sekali 6 (enam) upaya dalam Penanganan Inflasi daerah atau mengalami penurunan 12 Pemda dibandingkan minggu lalu sebanyak 30 Pemda.
7. Terdapat 379 Pemda yang melaporkan perkembangan kenaikan harga, 426 Pemda yang melakukan operasi pasar, 335 Pemda yang melakukan Rapat Teknis TPID, 378 Pemda yang melakukan sidak ke pasar, 297 Pemda yang berkoordinasi dengan daerah penghasil dan 293 Pemda yang melakukan pencanangan gerakan menanam.
8. Solusi pengendalian inflasi di daerah yang harus di laksanakan oleh semua Daerah

Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Kunci Utama Isu pengendalian inflasi jadikan isu prioritas dan sinergi semua *stakeholder* saat penanganan pandemi Covid-19
 - b. Komunikasi Publik Jangan membuat masyarakat panik dan upayakan masyarakat agar tetap tenang.
 - c. Aktifkan Satgas Pangan di daerah untuk dapat melaporkan harga dan ketersediaan komoditas kepada Kepala Daerah.
 - d. BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu subsidi untuk masyarakat miskin, perlu pengawasan oleh Pemda dan bantuan pengawasan dari penegak hukum.
 - e. Laksanakan Gerakan Penghematan Energi
 - f. Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen
 - g. Laksanakan Kerja Sama Antar Daerah
 - h. Intensifkan Jaring Pengaman Sosial
 - Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT)
 - Anggaran Bantuan Sosial (Bansos)
 - Anggaran Desa
 - Realokasi Dana Alokasi Umum (DAU)
 - Bantuan Sosial (Bansos) Pusat
 1. Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) Provinsi umumkan angka inflasi hingga Kabupaten/Kota
 2. Pemerintah Pusat mengharapkan kepada Pemerintah Daerah melaksanakan hal yang sama di setiap daerah sampai dengan akhir tahun 2022 dan kolaborasi antar berbagai pihak terkait guna Upaya stabilitas harga , memastikan ketersediaan pasokan, stabilitas harga dan komitmen pelaku usaha untuk menjaga Nataru tetap kondusif.
 3. Setiap Daerah untuk dapat mengantisipasi menjelang Hari Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, menunjukkan tren kenaikan harga signifikan dibandingkan minggu lalu dan bulan lalu terutama bahan pangan diantaranya telur ayam ras, daging ayam ras dan cabe karena kenaikan permintaan.
 4. Diharapkan kepada setiap Pemerintah Daerah untuk segera melaksanakan rapat menyambut menjelang Hari Natal dan Tahun Baru (Nataru), melaksanakan pemantauan dan sidak pasar terutama harga dan stok pangan di daerah agar tidak terjadi kenaikan harga dan kekurangan stok pangan di daerah, melaksanakan operasi pasar, pengawalan kelancaran distribusi dan mengoptimalkan APBD untuk pengendalian Inflasi Daerah.
21. Pada tanggal 23 Desember 2022 dilaksanakan pemantauan dan sidak pasar di pasar Atas Sarolangun untuk memastikan dan menjaga kestabilan harga pangan dalam menghadapi Hari Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 di Kabupaten Sarolangun yang dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda, Ketua DPRD dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun.
22. Pada tanggal 26 Desember 2022 mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi di Daerah mingguan yang ke Sembilan yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kemendagri Jakarta Pusat, di Kabupaten Sarolangun dipimpin langsung oleh Bapak Bupati Sarolangun yang dihadiri oleh Forkopinda dan Anggota TPID Kabupaten Sarolangun, dengan ini dapat kami sampaikan hasil sebagai berikut :
1. Kondisi Inflasi Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Bulan November 2022, inflasi gabungan Se-Provinsi Kalimantan Selatan Inflasi Tertinggi 7,06% dan Maluku Utara Inflasi Terendah 3,26 %, inflasi gabungan KabupateSe-ProvinsiInflasi Tertinggi Kabupaten Bulungan 9,20% dan Kab. Sumba Timur Inflasi Terendah 3,36 %, inflasi

gabungan Kota Se-Provinsi Inflasi Tertinggi Kota Serang 7,59% dan Kota Medan Inflasi Terendah 4,95 %.

2. Sebagian besar harga barang kebutuhan pokok per 23 Desember 2022 beberapa komoditas mulai menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dibandingkan minggu lalu dan bulan lalu, Komoditas yang perlu menjadi perhatian di antaranya telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan cabai.
3. Kondisi Pangan yang mengalami kenaikan cabe rawit merah mengalami kenaikan harga 12,42% dari bulan lalu dipengaruhi oleh faktor cuaca hujan terus menerus dan telur ayam ras mengalami kenaikan harga 8,62% dari bulan lalu.
4. Upaya stabilitas harga yang akan dilakukan seminggu kedepan memastikan ketersediaan pasokan, stabilisasi harga dan komitmen pelaku usaha untuk menjaga nataru tetap kondusif.
5. Pemerintah Pusat mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat melakukan hal yang sama di setiap daerah dengan terus berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait dalam rangka menjaga harga tetap stabil dan terjangkau serta pasokan tersedia.
6. Dari 6 (enam) upaya konkrit pemda dalam penanganan inflasi daerah dari 9 (sembilan) upaya tersebut, terdapat 6 (enam) upaya yang sifatnya konkrit dilakukan Pemda pada Bulan Desember 2022 minggu ke empat antara lain :
 - 121 Daerah yang telah melakukan ke 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi.
 - 171 Daerah yang telah melakukan 4 s/d 5 dari 6 (enam) upaya konkrit dalam penanganan inflasi.
 - 198 Daerah yang belum melakukan upaya konkrit dalam penanganan inflasi, karena hanya melakukan 1 (satu) s.d 3 (tiga) upaya dalam penanganan inflasi.
 - 18 Daerah yang belum melakukan sama sekali upaya konkrit dalam penanganan inflasi.
7. Hasil kepatuhan penyampaian laporan minggu IV Desember 2022 masih terdapat 29 Pemda yang tidak menyampaikan laporan harian sepanjang minggu ke IV Desember 2022.
8. Persentase Realisasi Pendapatan APBD Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2022 daerah tertinggi Provinsi Jawa Barat 101,40% dan terendah Provinsi Sulawesi Tengah 82,78%. tertinggi Kabupaten Lanny Jaya 93,45% dan terendah Kabupaten Kep. Selayar 85,55%. Tertinggi Kota Tanjung Pinang 101,56% dan terendah Makassar 79,62%.
9. Persentase Realisasi Belanja APBD Provinsi, Kabupaten/Kota Se-Indonesia Tahun 2022 daerah tertinggi Provinsi Kalimantan Timur 108,62% dan terendah Provinsi DKI Jakarta 79,82%. tertinggi Kabupaten Bojonegoro 121,05% dan terendah Kabupaten Bangka Selatan 58,78%. Tertinggi Kota Banjar Baru 114,41% dan terendah Kota Sorong 72,23%.
10. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga APBD Kabupaten Se-Indonesia Per 23 Desember Tahun 2022, dari 415 Kabupaten Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk Belanja Tidak Terduga, 397 daerah telah melakukan realisasi, sementara 18 daerah lainnya belum melakukan realisasi.
11. Persentase Realisasi Belanja Tidak Terduga APBD Kota Se-Indonesia per 23 Desember Tahun 2022, dari 93 Kota Yang Mengalokasikan Anggaran Untuk Belanja Tidak Terduga, 89 daerah telah melakukan realisasi, sementara 4 daerah lainnya belum melakukan realisasi (realisasi 0%).
12. Penyaluran Dana Desa (Per tanggal 25 Desember 2022) total Dana Desa seluruh Indonesia Tahun 2022 sebesar Rp. 68T dengan penyaluran Dana Desa Per tanggal 25 Desember 2022 sebesar 67,51 (99,29%).
13. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10/8922/Sj Tentang Peningkatan Kesiapan Pemerintah Daerah pada saat Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru

2023 ditetapkan Tanggal 20 Desember 2022 setiap daerah agar dapat melaksanakan antara lain :

- Melakukan koordinasi, fasilitasi, pengendalian, dan memonitor persiapan pelaksanaan Libur Natal Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023 Bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan pemangku kepentingan terkait.
- Memetakan kegiatan keagamaan khususnya perayaan Natal Tahun 2022 dan mengoordinasikan Forkopimda agar tercipta kondisi aman, nyaman dan tertib
- Melakukan pengendalian inflasi dengan mengoptimalkan pengawasan harga dan ketersediaan kebutuhan pokok serta bahan bakar.
- Memastikan kesiapan sarana transportasi dalam rangka mengantisipasi lonjakan penumpang dan distribusi barang → koordinasi dengan Kepolisian dan stakeholder terkait.
- Mewaspadai potensi kerawanan dan gangguan keamanan dan ketenteraman pada saat Tahun Baru 2023 di tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan serta menempatkan unsur pengamanan pada titik-titik tertentu.
- Lakukan koordinasi intensif dengan aparat keamanan (TNI dan Polri) dalam melakukan deteksi dini situasi dan kondisi keamanan serta trantibum yang berpotensi menjadi gangguan yang disebabkan aksi terorisme, pencurian, penodongan, sweeping oleh Ormas, dan kejahatan lainnya.
- Mengoordinasikan peningkatan keamanan di lingkungan terkecil (RT/RW) guna mencegah terjadinya pencurian pada rumah-rumah kosong

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

V. REKOMENDASI KEBIJAKAN INFLASI DAERAH

Kebijakan yang dapat ditempuh oleh TPID Kabupaten Sarolangun bersama OPD terkait dalam kerangka mengantisipasi kenaikan harga kebutuhan bahan pokok dan bahan penting lainnya guna stabilisasi harga, Pemerintah Daerah dapat diambil beberapa kebijakan adalah :

1. Dengan lahirnya kepres Nomor 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Nasional dan Kepmendagri No.500.05-8135 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi Daerah, maka daerah harus menyesuaikan pembentukannya di daerah masing-masing sehingga sistem yang terbangun dapat membentuk konektivitas antar TPID diseluruh Indonesia.
2. Terkait hal tersebut, TPID Kabupaten Sarolangun telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati yang terkait tugas, susunan keanggotaan TPID, pembinaan dan pengawasan TPID Kabupaten Sarolangun. Penguatan TPID sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi.
3. TPID Kabupaten Sarolangun agar memperkuat koordinasi dalam pengendalian harga yang terkait faktor musiman seperti tanaman pangan, sekolah, liburan, hari besar keagamaan nasional dan sebagainya serta terkait infrastruktur pertanian, sarana & prasarana distribusi hasil pangan dalam hal ini mengefektifkan fungsi pasar.
4. Perlu adanya Kerjasama Antar Daerah (KAD) antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi maupun antar Kabupaten/Kota di luar Provinsi, sehingga masing-masing OPD terkait memiliki data akurat mengenai ketersediaan bahan pangan pokok di lapangan sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dilakukan antar Kabupaten/Kota. Kerjasama Antar Daerah (KAD) juga dapat menjadi nilai tambah dalam penilaian Evaluasi Laporan Tahunan.
5. Kabupaten Sarolangun telah melaksanakan Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan Kabupaten Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat yang dilaksanakan Pada

tanggal 4 November 2022 Penandatanganan Naskah Kerjasama Antar Daerah (KAD) di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatra Barat.

6. Melaksanakan pengawasan, pemantauan dan pembinaan terhadap distributor terkait ketersediaan bahan pangan pokok, penerapan Harga Eceran Tertinggi sesuai ketentuan yang berlaku dan memastikan jalur Distribusi tidak terganggu dan menjaga distribusi pasokan bahan pangan dari sentra produksi ke pusat perdagangan berjalan dengan lancar sehingga stabilitas harga dapat terjaga.
7. Memperkuat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sarolangun melalui Rapat Koordinasi di daerah, Rapat Koordinasi Provinsi dan Rapat Koordinasi Nasional, untuk mengatasi permasalahan yang ada khususnya menghadapi hari-hari besar nasional maupun kenaikan harga BBM.

Sarol
angu
n,
13
Janu
ari
2023

Ketua
Haria
n
TPID

**Sekr
etari
s
Daer
ah**

ttd

**Ir.
Enda
ng
Abdu
l
Nase
r**

Pemb
ina
Utam
a
Mady

a

Nip.
1963
1010
1992
03 1
007